

LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BAGIAN ANGGARAN 018

SEMESTER II

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN

PERKEBUNAN AMBON

018.05.2100.567717.KD

Untuk Periode Yang Berakhir

31 Desember 2020



Jalan Pertanian Passo – Ambon

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Ambon, 31 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ardi Praptono, SP., M. Agr
NIP. 197409131999031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Lain-lain

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Barang dan Jasa

D.4. Beban Pemeliharaan

D.5. Beban Perjalanan Dinas

D.6. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

- D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 31 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ardi Praptono, SP, M. Agr
NIP. 197409131999031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 27.003.830,00 atau mencapai 49,19% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 54.900.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 22.679.433.232,00 atau mencapai 94,87% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 23.906.547.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 54.520.778.743,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 53.790.294.939,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp730.483.804,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp54.520.778.743,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp27.003.830,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp16.727.774.654,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-16.700.770.824,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp0,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-16.700.770.824,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp53.357.346.554,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-16.700.770.824,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-4.788.226.389,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp22.652.429.402,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp54.520.778.743,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN AMBON LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020			31 Desember 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	54.900.000,00	27.003.830,00	49,19	57.943.661,00
Jumlah Pendapatan		54.900.000,00	27.003.830,00	49,19	57.943.661,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	10.526.096.000,00	9.572.801.043,00	90,94	9.394.129.186,00
Belanja Barang	B.4.	4.802.248.000,00	4.547.046.089,00	94,69	8.035.228.901,00
Belanja Modal	B.5.	8.578.203.000,00	8.559.586.100,00	99,78	1.263.873.189,00
Jumlah Belanja		23.906.547.000,00	22.679.433.232,00	94,87	18.693.231.276,00

II. NERACA

**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN AMBON
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	0,00	21.500.000,00
Jumlah Aset Lancar		0,00	21.500.000,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	24.982.462.990,00	25.419.457.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	34.059.115.798,00	33.197.570.798,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	24.012.993.110,00	22.235.333.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	327.016.800,00	327.016.800,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	11.000.000,00	11.000.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	1.517.289.400,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	-31.119.583.159,00	-28.725.343.078,00
Jumlah Aset Tetap		53.790.294.939,00	52.465.034.520,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	1.492.167.240,00	1.647.876.990,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-761.683.436,00	-762.048.937,00
Jumlah Aset Lainnya		730.483.804,00	885.828.053,00
Jumlah Aset		54.520.778.743,00	53.372.362.573,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	0,00	15.016.019,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	15.016.019,00
Jumlah Kewajiban		0,00	15.016.019,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	54.520.778.743,00	53.357.346.554,00
Jumlah Ekuitas		54.520.778.743,00	53.357.346.554,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		54.520.778.743,00	53.372.362.573,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN AMBON
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	27.003.830,00	37.943.487,00
JUMLAH PENDAPATAN		27.003.830,00	37.943.487,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	9.572.801.043,00	9.394.129.186,00
Beban Barang dan Jasa	D.3.	2.312.661.770,00	4.063.801.791,00
Beban Pemeliharaan	D.4.	531.172.000,00	524.439.018,00
Beban Perjalanan Dinas	D.5.	1.688.196.300,00	3.406.947.352,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	21.500.000,00	13.000.000,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.6.	0,00	10.000.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	2.601.443.541,00	2.579.960.425,00
JUMLAH BEBAN		16.727.774.654,00	19.992.277.772,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-16.700.770.824,00	-19.954334.285,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	0,00	20.000.174,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	20.000.174,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-16.00.770.824,00	-19.934.334.111,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN AMBON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1.	53.357.346.554,00	111.185.173.050,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-16.700.770.824,00	-19.934.334.111,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-4.788.226.389,00	-56.528.780.000,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	-6.050.007.334,00	-56.528.780.000,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	1.261.780.945,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	22.652.429.402,00	18.635.287.615,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	54.520.778.743,00	53.357.346.554,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon adalah merupakan salah satu UPT Pusat Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsi berdasarkan Permentan Nomor 10/Permentan / OT.140 / 2 / 2008. Kantor Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. berkedudukan di Jalan Pertanian Passo – Ambon.

Kantor Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon berkomitmen dengan visi “ *Menjadi balai acuan yang profesional dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan*”.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

Misi BBPPTP Ambon adalah :

- 1) Mengoptimalkan pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul dan pemanfaatan agens pengendali hayati;
- 2) Mengoptimalkan pengawasan mutu benih dan peredarannya serta pemanfaatan agens pengendali hayati;
- 3) Meningkatkan pelaksanaan uji adaptasi dan observasi dalam rangka pencarian dan pelepasan varietas serta pemanfaatan agens pengendali hayati;
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan metode pengawasan mutu benih dan penerapan PHT;
- 5) Mengembangkan teknik identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- 6) Mengoptimalkan pengendalian OPT, Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan dan Dampak Anomali Iklim;
- 7) Meningkatkan pelayanan teknis pengawasan mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan;
- 8) Meningkatkan pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

Tujuan

Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas tanaman dan mutu produk perkebunan yang berdaya saing tinggi, maka tujuan penyelenggaraan BBPPTP Ambon sebagai berikut :

- 1) Membangun kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan mutu benih dan peredarannya serta pemanfaatan agens pengendali hayati dalam penerapan PHT.
- 2) Mengembangkan metode uji adaptasi dan observasi pencarian dan pelepasan varietas, pengujian mutu benih dan teknik pengendalian OPT spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan.
- 3) Mengembangkan jejaring dan kerjasama antara laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

Sasaran

Output atau sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah :

- 1) Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.
- 2) Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
- 3) Terlaksananya pelayanan organisasi yang berkualitas.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- a. Aset Lancar**
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	20.750.000,00	20.750.000,00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	16.150.000,00	16.150.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00
Jumlah Pendapatan	54.900.000,00	54.900.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.809.696.000,00	10.096.796.000,00
Belanja Honorarium	691.400.000,00	404.300.000,00
Belanja Lembur	25.000.000,00	25.000.000,00
Belanja Barang Operasional	1.012.044.000,00	1.137.104.000,00
Belanja Barang Non Operasional	3.722.854.000,00	1.109.246.000,00
Belanja Jasa	1.056.069.000,00	316.500.000,00
Belanja Pemeliharaan	617.172.000,00	531.172.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.580.220.000,00	1.708.226.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	6.051.300.000,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	56.250.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.536.995.000,00	867.793.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.208.986.000,00	7.710.410.000,00
Jumlah Belanja	74.367.986.000,00	23.906.547.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp27.003.830,00 atau mencapai 49,19% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp54.900.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	16.150.000,00	25.577.430,00	158,37
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	20.750.000,00	1.330.000,00	6,41
Pendapatan Jasa Lainnya	18.000.000,00	96.400,00	0,54
Jumlah	54.900.000,00	27.003.830,00	49,19

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami penurunan sebesar -53,40% dibandingkan TA 2019.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	25.577.430,00	27.882.980,00	-8,27
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.330.000,00	1.870.000,00	-28,88
Pendapatan Denda	0,00	7.699.997,00	100,00
Pendapatan Jasa Lainnya	96.400,00	490.510,00	-80,35
Pendapatan Lain-lain	0,00	20.000.174,00	100,00
Jumlah	27.003.830,00	57.943.661,00	-53,40

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp22.679.433.232,00 atau 94.87% dari anggaran belanja sebesar Rp23.906.547.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	10.526.096.000,00	9.586.774.057,00	91,08
Belanja Barang	4.802.248.000,00	4.705.454.672,00	97,98
Belanja Modal	8.578.203.000,00	8.559.586.100,00	99,78
Total Belanja Kotor	23.906.547.000,00	22.851.814.829,00	95,59
Pengembalian Belanja		-172.381.597,00	0,00
Total Belanja	23.906.547.000,00	22.679.433.232,00	94,87

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 21.32% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Realisasi belanja pegawai bertambah di karenakan adanya penambahan pegawai.
2. Realisasi Belanja modal besar dikarenakan adanya anggaran untuk pembangunan gedung

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Belanja Pegawai	9.572.801.043,00	9.394.129.186,00	1,90
Belanja Barang	4.547.046.089,00	8.035.228.901,00	-43,41
Belanja Modal	8.559.586.100,00	1.263.873.189,00	577,25
Total Belanja	22.679.433.232,00	18.693.231.276,00	21,32

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.572.801.043,00 dan Rp9.394.129.186,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.90% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan CPNS sebanyak 7 orang dan kenaikan pangkat 16 orang
2. Kenaikan Pangkat pengabdian 7 orang
3. Kenaikan Gaji Berkala 59 Pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.157.474.057,00	9.377.016.825,00	-2,34
Belanja Honorarium	404.300.000,00	0,00	0,00
Belanja Lembur	25.000.000,00	17.120.000,00	46,03
Jumlah Belanja Kotor	9.586.774.057,00	9.394.136.825,00	2,05
Pengembalian Belanja Pegawai	-13.973.014,00	-7.639,00	182.816,80
Jumlah Belanja	9.572.801.043,00	9.394.129.186,00	1,90

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.547.046.089,00 dan Rp. 8.035.228.901,00. Realisasi belanja barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar -43.41% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Realisasi belanja barang secara total mengalami penurunan karena adanya pandemi covid 19, sehingga membuat anggaran belanja barang berkurang, terutama pada belanja perjalanan dinas biasa
2. Belanja barang pada TA. 2020 terjadi refocusing di hampir semua belanja , karena adanya pandemi covid 19.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.135.554.000,00	1.086.636.000,00	4.50
Belanja Barang Non Operasional	1.101.556.239,00	1.994.837.926,00	-44.78
Belanja Jasa	237.027.525,00	977.868.605,00	-75.76
Belanja Pemeliharaan	531.172.000,00	524.439.018,00	1.28
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.700.144.908,00	3.406.947.352,00	-50.10
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	34.500.000,00	-100.00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	10.000.000,00	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	4.705.454.672,00	8.035.228.901,00	-41.44
Pengembalian Belanja Barang	-158.408.583,00	0,00	0.00
Jumlah Belanja	4.547.046.089,00	8.035.228.901,00	-43.41

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.559.586.100,00 dan Rp1.263.873.189,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 577.25% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Bertambahnya anggaran untuk belanja modal dikarenakan pada TA 2020 adanya pembangunan gedung laboratorium bio molekuler, rehabilitasi asrama, gedung kantor dan rehab gedung proteksi dan struktural.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	861.545.000,00	1.263.873.189,00	-31,83
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.698.041.100,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	8.559.586.100,00	1.263.873.189,00	577,25
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	8.559.586.100,00	1.263.873.189,00	577,25

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp861.545.000,00 dan Rp1.263.873.189,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 mengalami penurunan sebesar -31,83% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Menurunnya anggaran belanja modal untuk pos peralatan dan mesin

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	861.545.000,00	1.263.873.189,00	-31,83
Jumlah Belanja Kotor	861.545.000,00	1.263.873.189,00	-31,83
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	861.545.000,00	1.263.873.189,00	-31,83

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.698.041.100,00 dan Rp0.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 0.00% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Meningkatnya belanja modal pada pos gedung dan bangunan karena adanya pembangunan gedung laboratorium bio molekuler, rehabilitasi asrama, gedung kantor dan rehab gedung proteksi dan struktural.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.698.041.100,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	7.698.041.100,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	7.698.041.100,00	0,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp21.500.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	15.700.000,00
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00	5.800.000,00
Jumlah	0,00	21.500.000,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp24.982.462.990,00 dan Rp25.419.457.000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	25.419.457.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	-436.994.010,00
Saldo per 31 Desember 2020	24.982.462.990,00

Penjelasan mutasi pengurangan atas nilai Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi kurang atas nilai Tanah senilai Rp436.994.010 (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah), berasal dari:

1. Koreksi hasil revaluasi atas BMN yang tidak ditemukan

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp34.059.115.798,00 dan Rp33.197.570.798,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	33.197.570.798,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	861.545.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	34.059.115.798,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-29.279.737.067,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	4.779.378.731,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Penjelasan mutasi penambahan atas nilai Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp861.545.000 (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), berasal dari:

1. Pembelian Ac 3 unit untuk Nursery Maluku, Maluku Utara, Papua Barat
2. Pembelian 3 unit Komputer untuk Nursery Maluku, Maluku Utara, Papua Barat
3. Pembelian 3 unit Genset untuk Nursery Maluku, Maluku Utara, Papua Barat
4. Pembelian 3 unit Kendaraan roda 3 untuk Nursery Maluku, Maluku Utara, Papua Barat
5. Pembelian 15 unit AC
6. Pembelian 10 unit mesin Absensi
7. Pembelian 2 Unit laptop

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp24.012.993.110,00 dan Rp22.235.333.000,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	22.235.333.000,00
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	1.004.229.000,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.917.660.000,00
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	66.156.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	155.709.750,00
Pengembangan Nilai Aset	101.231.000,00
Pengembangan Melalui KDP	4.161.860.700,00
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	42,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Kesalahan input IP	-4.954.657.000,00
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	-16.173.058,00
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	-603.292.936,00
Koreksi BMN ditemukan Kembali	-55.063.388,00
Saldo per 31 Desember 2020	24.012.993.110,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-1.791.012.430,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	22.221.980.680,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah atas nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp10.491.500.796

Mutasi kurang atas nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp8.713.840.686

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp327.016.800,00 dan Rp327.016.800,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.000.000,00 dan Rp11.000.000,00.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.517.289.400,00 dan Rp0,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-31.119.583.159,00 dan Rp-28.725.343.078,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	34.059.115.798,00	-29.279.737.067,00	4.779.378.731,00
2.	Gedung dan Bangunan	24.012.993.110,00	-1.791.012.430,00	22.221.980.680,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	327.016.800,00	-48.833.662,00	278.183.138,00
4.	Aset Tetap Lainnya	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Akumulasi Penyusutan		58.410.125.708,00	-31.119.583.159,00	27.290.542.549,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.492.167.240,00 dan Rp1.647.876.990,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	1.647.876.990,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-155.709.750,00
Saldo per 31 Desember 2020	1.492.167.240,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-761.683.436,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	730.483.804,00

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-761.683.436,00 dan Rp-762.048.937,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	1.492.167.240,00	-761.683.436,00	730.483.804,00
Akumulasi Penyusutan		1.492.167.240,00	-761.683.436,00	730.483.804,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp15.016.019,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0.00	15.016.019,00
Jumlah	0.00	15.016.019,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp54.520.778.743,00 dan Rp53.357.346.554,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp27.003.830,00 dan Rp37.943.487,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	7.699.997,00	-100,00
Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	96.400,00	490.510,00	-80,35
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	25.577.430,00	27.882.980,00	-8,27
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	1.330.000,00	1.870.000,00	-28,88
Jumlah	27.003.830,00	37.943.487,00	-28,83

1. Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum sebesar Rp. 25.577.430,00 yang terdiri dari :

- Sertifikasi Kecambah Pala senilai Rp. 303.000,-
- Sertifikasi Kecambah Benih Pala senilai Rp. 302.150,-
- Sertifikasi Kecambah Pala senilai Rp. 200.000,-
- Benih Pala senilai Rp. 141.000,-
- Benih Pala senilai Rp. 2.001.800,-
- Pengujian Jamur Beauveria senilai Rp. 100.000,-
- Pengujian Jamur Trichoderma senilai Rp. 125.000,-
- Pengujian Jamur Metharizium senilai Rp. 100.000,-
- Kecambah Pala senilai Rp. 100.000,-
- Kecambah Pala senilai Rp. 50.000,-
- Kecambah Pala senilai Rp. 102.000,-
- Pengujian Jamur Beauveria senilai Rp. 100.000,-
- Pengujian Jamur Trichoderma senilai Rp. 125.000,-
- Pengujian Jamur Beauveria senilai Rp. 100.000,-
- Pengujian Jamur Beauveria& Tricho senilai Rp. 200.000,-
- Pengujian Jamur Metharizium senilai Rp. 200.000,-

• Pengujian Jamur Trichoderma	senilai Rp. 125.000,-
• Pengujian Jamur Beauveria	senilai Rp. 100.000,-
• Sertifikasi Benih Pala	senilai Rp. 2.000.000,-
• Sertifikasi Benih Pala	senilai Rp. 4.000.000,-
• Sertifikasi Benih Pala	senilai Rp. 8.000.000,-
• Sertifikasi Benih Pala	senilai Rp. 103.000,-
• Sertifikasi Kecambah Pala	senilai Rp. 102.500,-
• Hasil Pengujian Lab	senilai Rp. 480.000,-
• Hasil Sertifikasi Kecambah Pala	senilai Rp. 55.000,-
• Sertifikasi Benih Pala	senilai Rp. 200.000,-
• Pengujian Jamur Metharizium & Beauveria	senilai Rp. 600.000,-
• Pengujian Trichoderma	senilai Rp. 375.000,-

2. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp. 1.330.000,00

Akun 425112 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya berupa :

• Pemesanan Jamur Metharizium	senilai Rp. 70.000,00
• Pemesanan Jamur Beauveria & Metharizium	senilai Rp. 70.000,00
• Pemesanan Jamur Beauveria & Trichoderma	senilai Rp. 70.000,00
• Pemesanan Jamur Beauveria & Trichoderma	senilai Rp. 70.000,00
• Pemesanan Jamur Metharizium, Beauveria & Trichoderma	senilai Rp. 735.000,00
• Pemesanan Jamur Metharizium, Beauveria & Trichoderma	senilai Rp. 315.000,00

3. Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp. 96.400,00

Akun 425691 Pendapatan Jasa Pengawasan / Pemeriksaan berupa :

• Benih Cengkeh	senilai Rp. 7.200,00
• Benih Tebu (pemeriksaan kebun)	senilai Rp. 40.000,00
• Sertifikasi Benih Tebu	senilai Rp. 20.000,00
• Sertifikasi Benih Tebu	senilai Rp. 9.200,00
• Sertifikasi Benih Tebu	senilai Rp. 20.000,00

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp9.572.801.043,00 dan Rp9.394.129.186,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	6.614.277.600,00	6.789.097.860,00	-2,58
Beban Pembulatan Gaji PNS	95.017,00	86.218,00	10,21
Beban Tunj. Anak PNS	97.082.902,00	109.907.039,00	-11,67
Beban Tunj. Beras PNS	273.023.400,00	293.301.000,00	-6,91
Beban Tunj. Fungsional PNS	338.520.000,00	380.030.000,00	-10,92
Beban Tunj. PPh PNS	6.925.308,00	9.143.865,00	-24,26
Beban Tunj. Struktural PNS	60.700.000,00	64.750.000,00	-6,25
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	450.062.816,00	471.428.204,00	-4,53
Beban Tunjangan Umum PNS	195.750.000,00	198.085.000,00	-1,18
Beban Uang Honor Tetap	404.300.000,00	0,00	0,00
Beban Uang Lembur	25.000.000,00	17.120.000,00	46,03
Beban Uang Makan PNS	1.107.064.000,00	1.061.180.000,00	4,32
Jumlah	9.572.801.043,00	9.394.129.186,00	1,90

Bila dibandingkan antara beban pegawai dan realisasi belanja pegawai terdapat selisih. Pada tahun 2020, bulan Desember telah direalisasikan gaji, sehingga beban gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan fungsional, tunjangan struktural, tunjangan suami/istri dan tunjangan umum, mengalami penurunan, sedangkan uang lembur dan uang makan mengalami kenaikan.

D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.312.661.770,00 dan Rp4.063.801.791,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00	6,232,980,00	-100,00
Beban Bahan	288.761.650,00	1.046.275.000,00	-72,40
Beban Barang Non Operasional Lainnya	244.624.614,00	560.194.926,00	-56,33
Beban Barang Operasional Lainnya	210.700.000,00	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	148.650.000,00	114.600.000,00	29,71
Beban Honor Output Kegiatan	421.710.000,00	388.368.000,00	8,59
Beban Jasa Konsultan	0,00	449.830.800,00	-100,00
Beban Jasa Lainnya	12.000.000,00	253.599.000,00	-95,27
Beban Jasa Profesi	1.800.000,00	12.600.000,00	-85,71
Beban Keperluan Perkantoran	522.454.000,00	665.036.000,00	-21,44
Beban Langganan Air	7.812.600,00	11.359.352,00	-31,22
Beban Langganan Listrik	133.846.537,00	170.419.493,00	-21,46
Beban Langganan Telepon	36.552.369,00	39.286.240,00	-6,96
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	243.750.000,00	297.000.000,00	-17,93
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Beban Sewa	30.000.000,00	39.000.000,00	-23,08
Jumlah	2.312.661.770,00	4.063.801.791,00	-43,09

Beban barang dan jasa per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 43,09 % dibandingkan tahun anggaran per 31 Desember 2019. Hal ini dikarenakan terjadi refocusing hampir disemua belanja, karena adanya pandemi covid 19 sehingga pemakaian barang dan jasa secara keseluruhan berkurang.

D.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp531.172.000,00 dan Rp524.439.018,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	16.500.000,00	81.750.000,00	-79,82
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	514.672.000,00	442.689.018,00	16,26
Jumlah	531.172.000,00	524.439.018,00	1,28

Beban pemeliharaan per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 1,28 % dibandingkan tahun anggaran per 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan berkurangnya biaya pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya.

D.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1,688,196,300.00 dan Rp3,406,947,352.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.645.396.300,00	3.298.497.352,00	-50,12
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.800.000,00	52.950.000,00	-83,38
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	55.500.000,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	34.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1,688,196,300.00	3.406.947.352,00	-50,45

Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 50,45% dibandingkan 31 Desember 2019 karena berkurangnya perjalanandinas biasa, perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas paket meeting dalam dan luar kota . Untuk mendukung kegiatan balai akibat revisi pengurangan anggaran karena adanya pandemic COVID-19.

D.6. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp21.500.000,00 dan Rp23.000.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0,00	10.000.000,00	-100,00
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	5.800.000,00	13.000.000,00	-55,38
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	15.700.000,00	0,00	0,00
Jumlah	21.500.000,00	23.000.000,00	-6,52

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.601.443.541,00 dan Rp2.579.960.425,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	607.952.484,00	599.460.836,00	1,42
Beban Penyusutan Jaringan	9.147.198,00	9.147.198,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	30.776.449,00	32.333.548,00	-4,82
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.953.567.410,00	1.939.018.843,00	0,75
Jumlah	2.601.443.541,00	2.579.960.425,00	0,83

Beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,83 % dibandingkan tahun anggaran yang lalu 31 desember 2019.

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	20.000.174,00	-100,00
Jumlah	0,00	20.000.174,00	-100,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp53.357.346.554,00 dan Rp111.185.173.050,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-16.700.770.824,00 dan Rp-19.934.334.111,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-4.788.226.389,00 dan Rp-56.528.780.000,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-6.050.007.334,00 dan Rp-56.528.780.000,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2020.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Tanah	-436.994.010,00
Gedung dan Bangunan	-5.629.186.340,00
Jumlah	-6.050,007.334,00

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.261.780.945,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	191.395.945,00
Gedung dan Bangunan	1.070.385.000,00
Jumlah	1.261.780.945,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp22.652.429.402,00 dan Rp18.635.287.615,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	22.679.433.232,00
Diterima dari Entitas Lain	-27.003.830,00
Jumlah	22.652.429.402,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 saldo DDEL adalah sebesar Rp-27.003.830,00 sedangkan DKEL sebesar Rp22.679.433.232.00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp54.520.778.743,00 dan Rp53.357.346.554,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

1. Terdapat 5 (lima) kali revisi Pagu DIPA dan POK pada TA 2020 sebagai berikut :
 - Revisi pertama tanggal 02 Maret 2020 dari sumber dana awal sebesar Rp 74.367.986.000,00
 - Revisi kedua tanggal 27 Maret 2020 dari sumber dana awal sebesar Rp 74.367.986.000,00 menjadi Rp 69.975.596.000,00 karena adanya pengurangan anggaran hampir di semua kegiatan.
 - Revisi ketiga tanggal 27 April 2020 dari dana awal sebesar Rp. 69.975.596.000,00 menjadi Rp. 27.849.989.000,00 karena dampak dari pandemi COVID 19.
 - Revisi keempat tanggal 19 Juni 2020 dari dana awal sebesar Rp. 27.849.989.000,00 menjadi Rp. 23.906.547.000,00 karena dampak dari pandemi COVID 19.
 - Revisi kelima tanggal 03 November 2020 sebesar Rp 23.906.547.000,00 tidak terjadi penambahan dan pengurangan anggaran karena merupakan revisi POK berupa belanja 521115, 521211, 532111 dan belanja 521213 ke belanja 524111
 - Revisi keenam tanggal 25 November 2020 sebesar Rp 23.906.547.000,00 tidak terjadi penambahan dan pengurangan anggaran karena merupakan revisi POK berupa revisi gaji.
 - Revisi ketujuh tanggal 09 Februari 2021 sebesar Rp 23.906.547.000,00 tidak terjadi penambahan dan pengurangan anggaran karena merupakan revisi POK berupa belanja bahan 521211 ke belanja 521219.
2. Terdapat pengembalian belanja berupa :
 - Pengembalian belanja perjalanan dinas biasa akun 524111 sebesar Rp. 680.000,00 dengan nomor NTPN 232B18N3DEH2BNARDan NTB915484222409 tanggal 02 Juli 2020.
 - Pengembalian belanja Honor Output Kegiatan, akun 521213 sebesar Rp. 30.000,00 nomor NTPN 69DD18N3DEH2BNRNdand NTB 915508222413 tanggal 02 Juli 2020.
 - Pengembalian belanja bahan, akun 521211 sebesar Rp. 32.899.975,00 dengan nomor NTPN 039C648VU9QCO840 dan NTB 901545771812 tanggal 07 Agustus 2020.
 - Pengembalian belanja non operasional lainnya , akun 521219 sebesar Rp. 45.500.000,00 dengan nomor NTPN 649C52G4UKUEA562 dan NTB 901258020300 tanggal 03 November 2020.

- Pengembalian belanja bahan, akun 521211 sebesar Rp. 68.000.000,00 dengan nomor NTPN 165A361QTV7VU6O6 dan NTB 901481517700 tanggal 03 November 2020.
- Pengembalian belanja perjalanan biasa, akun 524111 sebesar Rp.11.268.608 dengan nomor NTPN 5E9A948VUA3NB3NQ dan NTB 917610758593 tanggal 19 November 2020.